

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Menurut Tambunan (Tambunan 2012) UMKM di Indonesia terbukti berperan penting dalam menghadapi akibat dan dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1997, ketika banyak perusahaan besar bangkrut, namun UMKM mampu bertahan ketika terjadi krisis.

Selain itu, UMKM juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi. UMKM juga menawarkan peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang juga dapat memberikan manfaat yang lebih baik (Susilo and Ratnawati 2015). UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari undang-undang tersebut, Usaha mikro dinyatakan sebagai usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan ekonomi perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dengan undang-undang. Usaha kecil adalah orang atau badan yang dijalankan secara mandiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, atau bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi standar pengelolaan. Barang-barang kecil yang ditentukan oleh undang-undang.

Usaha menengah adalah suatu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, atau besar yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau langsung atau tidak langsung menjadi bagiannya, oleh orang perseorangan atau kesatuan ekonomi, yaitu suatu usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri dan produktif. Bagi usaha menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut undang-undang ini, kriteria untuk mendefinisikan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah kekayaan bersih atau kekayaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu berada, atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan kriteria tersebut, usaha mikro adalah suatu badan yang nilai asetnya

tidak melebihi Rp50.000.000,00 atau yang omset tahunannya tidak melebihi Rp300.000.000,00. Usaha kecil dan menengah dengan nilai aset melebihi Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 atau omzet tahunan melebihi Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 atau omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00. (Tambunan 2012).

UMKM di provinsi Jawa Timur terlebih khusus di Kabupaten Ponorogo termasuk banyak jumlahnya. Kabupaten Ponorogo adalah salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan data dari dinas koperasi, perdagangan Ponorogo UMKM lokal di Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh memiliki jumlah tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga (38.463) yang sebarannya berada di dua puluh satu kecamatan di seluruh kota reyog Ponorogo serta di klasifikasikan menjadi 3 tipe sektor UMKM antarlain sektor perdagangan dengan jumlah totalnya dua puluh empat ribu dua ratus dua belas (24.212) kemudian sektor produksi jumlah totalnya tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu (7.321) serta yang termasuk dalam sektor jasa total jumlahnya enam ribu delapan ratus tujuh puluh (6.870). Dari data diatas UMKM kabupaten Ponorogo didominasi oleh UMKM dengan bidang perdagangan yang mana sebarannya mencakup 21 kecamatan di Ponorogo.

UMKM terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, dan mensosialisasikan manfaat pembangunan. Jumlah UMKM di Indonesia meningkat sangat pesat dan kini mampu menampung hampir 97,2% dari total angkatan kerja. Namun pesatnya peningkatan jumlah UMKM tidak dibarengi dengan omzet yang tinggi (Sariwaty et al. 2019). Masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha UMKM bersifat multidimensi, yang artinya UMKM memiliki banyak permasalahan (Maghfirah and BZ 2016) Seperti yang diungkapkan Kuncoro dalam Maria Nila Anggia and Muhammad Rifki Shihab 2019, Tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM bermacam-macam. Oleh karena itu, selain banyak tantangan yang dihadapi UMKM, mereka juga menghadapi kendala. Hambatan tersebut berupa

keterampilan, kompetensi, keahlian, manajemen talenta, kewirausahaan, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Namun menurut Ketua Indonesia Marketing Association (IMA) Muhammad Awouddin, faktor pengetahuan khususnya pengetahuan bisnis dan pemasaran menjadi permasalahan utama, namun salah satu kelemahan bisnis rumahan adalah tidak banyak orang yang mengetahuinya (Triya Pramudya Wardani 2017).

Sedangkan para pelaku UMKM Ponorogo pada umumnya masih menggunakan cara-cara yang tradisional dalam mempromosikan produknya, hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penjualan para pelaku UMKM tersebut. Sehingga perkembangan yang terjadi pada bisninya kurang signifikan dan cenderung lambat. Dampak dari lambatnya perkembangan bisnis inilah yang membuat kebanyakan pelaku bisnis Ponorogo gulung tikar atau menghentikan kegiatan usaha mereka. Dalam mempertahankan usahanya, para pelaku UMKM Ponorogo sangat membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah. Mengingat adanya keterbatasan pengetahuan dalam promosi dan skill lain yang berhubungan dengan pengembangan usaha. Hal ini dibuktikan dengan ketika ada program yang di laksanakan Dinas Pariwisata untuk mempromosikan UMKM banyak dari sebanyak 23 UMKM yang mendaftar, dua diantaranya adalah UMKM Sambal Mumase (Tambakbayan, Ponorogo) dan UMKM Gethuk Lindri Pak Sugeng (Mangkujayan, Ponorogo).

Pemerintah sangat mementingkan pengembangan UMKM agar mampu bertahan dan meningkatkan kesejahteraannya. Perhatian besar pemerintah terhadap UMKM merupakan langkah strategis tepat yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Keseriusan kepedulian pemerintah terhadap UMKM melalui program-program yang mengikutsertakan UMKM untuk tumbuh dan berkembangnya UMKM di Indonesia. Dengan landasan Peraturan Bupati Ponorogo (PERBUB) Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga. Dalam menjalankan fungsi perumusan dan pelaksana kebijakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo mengadakan beberapa event yang berfungsi untuk mendongkrak pariwisata yang ada di Ponorogo sekaligus UMKM Ponorogo.

Merespon fenomena tersebut, Disbudparpora Ponorogo melaksanakan event-event yang diselenggarakan secara berkala dengan melibatkan pelaku usaha UMKM, untuk mendongkrak promosi UMKM Ponorogo. Seperti konser musik, pameran seni, pagelaran reog, serta event keagamaan, semua event yang telah dilaksanakan oleh Disbudparpora Ponorogo diabadikan pada kanal media sosial Disbudparpora Ponorogo ([IG @ponorogo.tourism](https://www.instagram.com/ponorogo.tourism)), baik sesudah maupun sebelum event berlangsung. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Pemuda Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo menggelar Pekan Kreatif Ponorogo pada 24-28 Oktober 2023. Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari di Alun-alun Ponorogo.

Bertepatan dengan hari kreatif indonesia tanggal 24 Oktober Pekan kreatif Ponorogo diselenggarakan. Dengan tema yang diusung “Komunitas Ekonomi Kreatif Ponorogo Bersinergi”. Acara ini memberikan kesempatan bagi para insan industri kreatif Ponorogo untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kegiatan Pekan Kreatif Ponorogo yang digelar selama lima hari di Alun-Alun Ponorogo ini menarik perhatian dan mendapat respon positif. Stand pameran yang disediakan Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga akan menampilkan sejumlah besar produk-produk dari pelaku UMKM dan pelaku industri kreatif, yang menjual produk-produk terbaik mulai dari kuliner, fesyen, hingga produk kreatif dan kreasi. Beragamnya produk menarik yang dihadirkan para pelaku ekonomi kreatif Ponorogo menimbulkan antusias yang besar dari para pengunjung warung dan menikmati makanan yang ditawarkan.

Dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut maka peneliti menaruh minat untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PERAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MEMPROMOSIKAN UMKM PONOROGO (Study Kasus UMKM Sambal Mumase dan UMKM Getuk Sugeng dalam event Pekan Kreatif Ponorogo)”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Bagaimana Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Mempromosikan Kuliner Khas Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan bahan perbandingan dengan tahun-tahun selanjutnya dan sebagai pemikiran ilmiah untuk melengkapi penelitian guna memperluas ilmu pengetahuan., khususnya tentang Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo.

b. Secara Praktis

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan saran terkait Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini disemogakan bisa dijadikan bahan perbandingan serta menambah pengetahuan terkait Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo.

3. Bagi Penulis

Untuk memberi tambahan wawasan dan keterampilan dalam bidang penelitian.

E. Penegasan Istilah

1. Peranan dan Peran Pemerintah

Definisi dari peran yaitu tindakan yang diharapkan oleh orang-orang didalam bermasyarakat. Jabatan dalam hal ini diasumsikan merupakan kedudukan tertentu dalam masyarakat, yang bisa jadi tinggi. Sedang atau rendah. Jabatan merupakan suatu wadah yang memuat hak dan kewajiban tertentu. Hak

dan kewajiban tersebut sekaligus dapat dikatakan sebagai peran (Renaldi 2021). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran pemerintah terlihat dari cara kerja lembaga dengan perangkatnya, yaitu birokrasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dalam hal ini birokrasi diharapkan dapat menangani fungsi administrasi dan pelayanan dengan baik, konsep lama birokrasi yang terkenal rumit dan hierarkinya harus diminimalkan (Fitriana, Hilman, and Triono 2020)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat tingkatan yang diharapkan dari orang-orang dalam masyarakat (KBBI Daring n.d.). Peran merupakan bagian dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, maka ia memenuhi suatu peran (pelaku). Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peran menunjukkan lebih banyak tindakan, adaptasi, dan sebagai sebuah proses. Secara khusus seseorang (lembaga) mengambil kedudukan atau tempat dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran (Soekanto 2009). Oleh karena itu, peran pemerintah pusat dan daerah sangat berperan penting dalam pengembangan UMKM, agar UMKM menjadi penopang perekonomian nasional dan daerah.

Sementara itu, Diva menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai fasiliator

Pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan dan sarana kepada UMKM untuk mencapai tujuan tersebut. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa pelatihan, bantuan, subsidi barang dan jasa, pengecualian atau keringanan, atau keistimewaan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri..

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah merumuskan kebijakan yang memudahkan pengembangan usaha bagi UMKM. Sebagai regulator, pemerintah memastikan lingkungan usaha tetap kondusif bagi investasi dengan mengatur suku bunga Bank Indonesia (SBI) dan menerbitkan pedoman aturan persaingan bagi dunia usaha. Pemerintah merupakan pihak yang dapat menegakkan aturan agar kehidupan berjalan dengan baik dan dinamis. Tanggung jawab fungsi regulasi ini terbagi antara otoritas pemerintah pusat dan otoritas pemerintah daerah. Keduanya mempunyai kewenangan masing-masing untuk mengatur masyarakat di daerahnya masing-masing.

3. Pemerintah sebagai katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah Sesuatu yang menyebabkan perubahan, menimbulkan peristiwa baru, atau mempercepat proses terjadinya peristiwa. Selain sebagai katalis, pemerintah juga akan berperan sebagai stimulan untuk mempercepat proses pengembangan UMKM. Partisipasi pemerintah dalam proses pembangunan ini tidak akan berlangsung secara keseluruhan, melainkan hanya sebagai akselerator saja. Pemerintah dapat mengambil berbagai tindakan, termasuk: Misalnya memberikan penghargaan kepada UMKM, memberdayakan komunitas kreatif agar produktif dibandingkan konsumtif, dan memberikan permodalan, termasuk modal ventura dan modal bergulir, serta infrastruktur intelektual bagi UMKM, dan lain-lain (I Gede Putu Anggara Diva 2009).

2. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUB) Ponorogo Nomor 138 Tahun 2019 mengenai Kedudukan, Penjabaran Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga sebagai kepanjangan tangan dari Bupati dalam menjalankan kepentingan

pemerintahan daerah di sektor Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga.

Guna menjalankan tugas tersebut Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai :

- Pihak yang merumuskan kebijakan yang berurusan dengan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga
- Pihak yang melaksanakan kebijakan yang berurusan dengan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga
- Pihak yang melaksanakan evaluasi dan pelaporan yang berurusan dengan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga
- Pihak yang melaksanakan administrasi dinas; serta pihak yang melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Promosi

Menurut Laksana (2019, p. 129) “promosi adalah komunikasi antara penjual dan pembeli, yang dihasilkan dari informasi yang benar dan bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku pembeli yang sebelumnya tidak mengenalnya, menjadi akrab, sehingga menjadi pembeli dan masih ingat produknya.” Kampanye merupakan suatu kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen yang bertujuan untuk mengingatkan konsumen agar melakukan kegiatan membeli sesuai keinginannya (Garaika and Feriyan 2019). Menurut Basu Swastha & Irawan, adalah suatu aliran informasi atau persuasi satu arah untuk mengarahkan seseorang atau organisasi pada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi merupakan bagian dari pemasaran produk (Syahputra 2019). Promosi merupakan cara produsen menyampaikan pesan kepada masyarakat atau cara produsen mengkomunikasikan jasanya kepada masyarakat (Listyawati 2016).

4. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kepanjangan dari UMKM. Pada dasarnya, UMKM ialah bisnis atau usaha yang dilaksanakan oleh kelompok, individu, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Sebagai negara berkembang Indonesia memutuskan UMKM dijadikan pondasi penting bagi bidang perekonomian masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi hal ini

dinilai mampu membawa kemajuan bagi masyarakat untuk berkembang dan mandiri. UMKM ialah salah satu faktor penentu didalam proses pembangunan nasional, UMKM memegang peran yang vital dalam pertumbuhan perekonomian negara dan penyerapan tenaga kerja (Muljanto 2020).

F. Landasan Teori

1. Peranan

Berdasarkan terminologinya, peran merupakan serangkaian tindakan yang diharapkan oleh orang-orang dalam bermasyarakat. Peran dalam bahasa Inggris disebut dengan “role” yang memiliki arti “tanggung jawab atau tugas pribadi pada sebuah perusahaan”. Artinya "tanggung jawab dan tugas insan terhadap tempat kerja maupun bisnis". Sementara itu, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran ialah sebuah kegiatan yang mewajibkan seseorang atau suatu organisasi agar melaksanakan sebuah kegiatan sesuai dengan cita-cita yang telah disetujui bersama, supaya bisa dijalankan dengan sebaik-bijaknya (Brigette Lantaeda, Lengkong, and Ruru 2002).

Menurut Ralph Linton dalam Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar menjelaskan bahwa peran seseorang harus dipisahkan dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Kedudukan seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan kedudukan individu dalam tatanan sosial. Sebaliknya, peran mengacu pada tindakan, adaptasi, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang mengambil posisi dalam masyarakat dan memenuhi suatu peran.

Secara sosiologis peranan adalah orang yang bertindak atau memegang suatu jabatan dan yang memenuhi hak dan kewajiban jabatan itu. Apabila seseorang mengerjakan suatu tugas dengan baik, maka dengan sendirinya ia berharap apa yang dikerjakannya sesuai dengan keinginan lingkungannya. Peran umum adalah hadir dalam mendefinisikan proses pembangunan berkelanjutan. Peran tersebut bersifat statis atau dinamis dari penggunaan pihak-pihak dan tanggung jawab atau disebut subjektif. Peran merupakan aspek dinamis berupa kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berfungsi atau menduduki kedudukan dalam suatu sistem sosial (Rhamadhan

2023). Peran diartikan sebagai suatu tugas atau penugasan bagi seseorang atau sekelompok orang. Peran tersebut memiliki aspek sebagai berikut:

- a) Peran mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau seseorang tertentu dalam masyarakat. Dalam pengertian ini peran merupakan seperangkat aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran adalah pemahaman tentang hal-hal yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1.1 Jenis-Jenis Peranan

Ada beberapa Jenis peran, berikut adalah jenis-jenis peran :

- a) Peranan normatif merupakan peran yang dilaksanakan lembaga maupun seseorang yang dilandasi oleh seperangkat norma yang berlaku ddalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran ideal adalah peran yang dilaksanakan oleh lembaga maupun seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai ideal ataupun yang semestinya dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c) Peran faktual adalah peran peran yang dilaksanakan oleh lembaga maupun seseorang yang dilandasi oleh kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

1.2 Peran Pemerintah

Menurut Iyas Yusuf (Iyas Yusuf 2014) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat (Iyas Yusuf 2014). Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator yaitu memberikan arah yang menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan aturan

regulasi. Pemerintah memberikan hubungan mendasar dengan masyarakat sebagai alat untuk mengatur seluruh kegiatan pelaksanaan pemberdayaan..

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendorong dinamika lokal ketika muncul hambatan dalam proses pembangunan. Pengembangan dan pemeliharaan. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan insentif dan bimbingan serta bimbingan yang efektif kepada masyarakat lokal. Nasihat biasanya diberikan melalui tim penasihat atau badan khusus yang memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan, guna memenuhi kepentingan berbagai masyarakat dalam optimalisasi pembangunan daerah. Koneksi pengembangan. Pemerintah bertindak sebagai perantara, tidak hanya dalam bidang dukungan melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun juga dalam bidang pembiayaan dan permodalan dengan memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang diperkuat..

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu instrumen sistem manajemen pemerintahan. Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengacu pada badan administratif regional yang lebih kecil dari sebuah negara. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa wilayah. Daerah pedesaan dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan daerah perkotaan. Setiap wilayah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur secara hukum.

2. Teori Birokrasi Menurut Max Weber

Menurut Max Weber, pemerintah adalah alat untuk memenuhi suatu peran. Hal ini diungkapkan oleh Max Weber dalam teori birokrasinya, dimana birokrasi merupakan instrumen kekuasaan bagi pemilik yang

mengendalikannya, yakni ketika para birokrat mempunyai tujuan yang sama dalam meneruskan birokrasi, katanya ada. Max Weber mengatakan, tipe birokrasi rasional dapat ditemukan dengan berbagai cara.:

- a. Pejabat musti bersikap rasional dengan di beri batasan oleh jabatan yang dimiliki.
- b. Jabatan disusun dari tingkat hierarki melalui penempatan top-down dan side, sehingga menimbulkan perbedaan hubungan kekuasaan.
- c. Secara khusus, setiap tugas dan fungsi masing-masing jabatan harus berbeda.
- d. Kontrak Jabatan adalah milik semua pejabat dan harus dilaksanakan..
- e. Semua pejabat berhak mendapat gaji dan dana pensiun.
- f. Jenjang karir terstruktur dan mempunyai perkembangan yang jelas..
- g. Untuk menjamin profesionalisme dan kinerja unggul, setiap pejabat harus diseleksi sesuai dengan kualifikasinya.
- h. Larangan keras kepada pejabat untuk menyalah gunakan jabatannya.
- i. Pejabat harus disiplin, mengikuti aturan sesuai sistem, dan diawasi setiap saat (Wakhid 2011).

Penerapan birokrasi dengan pola lama pada akhirnya akan mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan akibatnya, selain praktik-praktik seperti kolusi dan korupsi, terlihat jelas ketidakefisienan dan ketidakefisienan keberadaan birokrasi, sehingga akan berujung pada patologi birokrasi. Kroniisme yang merajalela sehingga menimbulkan kebingungan dan permasalahan dalam kinerja pemerintahan. (Wakhid 2011).

Peran pemerintah dilihat dari berfungsinya lembaga-lembaga yang dilengkapi sarana, yaitu berfungsinya birokrasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, sebagai wujud eksistensi negara yang menangani permasalahan-permasalahan lokal.komunitas, mampu.Jika demikian, diharapkan mampu menjalankan fungsi administrasi dan

pelayanan dengan kompeten. Konsep-konsep birokrasi yang lama, yang terkenal dengan kompleksitas dan hierarkinya, perlu diminimalkan. (Usman 2011).

Pembenahan birokrasi yang ada di Indonesia dilakukan dengan melakukan reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan birokrasi yang diperlukan pada abad 21 adalah birokrasi yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi amanah rakyat, hal ini merupakan sebuah realisasi. (Wakhid 2011). Kunci tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada terciptanya birokrasi yang profesional dan baik (Samin 2011). Tata kelola yang baik merupakan perbaikan di berbagai bidang seperti paradigma, ideologi, budaya, bahkan manajemen pemerintahan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. (Duadji 2012).

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan serangkaian kebijakan untuk mempromosikan Kuliner Khas Ponorogo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas untuk perlu disusunnya penelitian terkait Analisa Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dalam mempromosikan UMKM Ponorogo.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kunci alur proses penelitian dan disesuaikan dengan konteks lokal untuk mencapai hasil penelitian. Definisi operasional dalam penelitian berjudul **“Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam Mempromosikan UMKM Ponorogo (Studi kasus: Event yang dilaksanakan Disbudparpora Periode 2022-2023)”** dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo mempromosikan UMKM Ponorogo
- 2) Program-program penguatan UMKM Ponorogo oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo mempromosikan UMKM Ponorogo
- 3) Efektifitas program penguatan UMKM Ponorogo melalui event

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan Moleong (2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mencerna suatu fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, serta dengan sebuah konteks khusus yang alamiah serta dengan mempergunakan berbagai metode alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Ponorogo dengan data dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, informan dimaksudkan kepada sekelompok orang dalam suatu otoritas atau lembaga. Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini mengidentifikasi metode pengumpulan sumber data dengan maksud untuk mengidentifikasi informan utama yang memiliki tingkat relevansi paling tinggi dengan focus penelitian tanpa memerlukan manipulasi apa pun untuk meningkatkan keakuratan keputusan. Peneliti memilih metode purposive sampling yang menggabungkan spesifik pertimbangan. Purposive sampling bias dimaknai sebagai alat penelitian untuk mengidentifikasi informan yang relevan dengan suatu lembaga atau sekelompok orang dalam suatu lembaga dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini (Poerwandari, 2017). Teknik pengambilan informan adalah merupakan cara yang digunakan dalam hal memperoleh data primer untuk bahan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan untuk penggalian informasi, meliputi:

1. Pejabat Dinas Kebudayaan : 1 Orang

Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Ponorogo

2. Penanggung jawab salah satu event Disbudparpora Ponorogo	: 1 Orang
3. Pelaku usaha UMKM Ponorogo	: 2 Orang
4. Konsumen UMKM Ponorogo	: 3 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 7 Orang

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan mengumpulkan data secara langsung di tempat penelitian. Data kualitatif adalah data yang tertulis, terucap atau tertulis, tentang perilaku manusia yang dapat diamati. (Taylor, S. J., Bogdan, R. 2015). Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui:

- Observasi, ialah perhimpunan data melalui pengamatan secara langsung kepada objek penelitian yang caranya adalah mencatat seluruh fenomena yang didapati di lapangan guna memperdalam data-data yang diperlukan sebagai dasar yang berkaitan terhadap topic penelitian. Sebelum terjun ke lapangan peneliti membuat pedoman observasi.
- Wawancara, ialah mengumpulkan data langsung dengan pemangku kepentingan dan memperoleh informasi yang diperlukan melalui tanya jawab secara langsung oleh pewawancara dan informan. Wawancara dilakukan dengan jujur dan secara langsung kepada informan dan partisipan penelitian. Sebelum terjun ke lapangan, panduan wawancara terlebih dahulu di siapkan oleh peneliti.
- Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari catatan dan dokumen yang tersedia di tempat penelitian maupun sumber lain yang relevan dengan

pertanyaan penelitian. Sebelum terjun ke lapangan, panduan dokumentasi terlebih dahulu di siapkan oleh peneliti..

5. Teknik Analisis Data

Menurut metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti prosedur yang dianjurkan. Miles dan Huberman (2014), Apa yang biasa disebut dengan model interaktif. Metode analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga unsur. Yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan pengujian kesimpulan dengan menganalisis permasalahan yang didapati di lapangan. Ini membentuk bayangan yang jelas mengenai objek yang diteliti dan memungkinkan penarikan kesimpulan.

Dalam melakukan analisis data, terdapat beberapa tahapan antara lain:

a. Pengumpulan Data

Langkah awal dari analisis data adalah pengumpulan data. Pada fase ini peneliti terlebih dahulu melaksanakan prosesi pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dirangkum untuk diproses secara sistematis.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian-dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya. Pada penelitian ini peneliti mengkondensasi data dengan cara meringkas data. Dengan meringkas data maka hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat peneliti kaitkan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika akan menganalisis data.

c. Penyajian data

Kumpulan informasi dalam bentuk uraian naratif atau tekstual, grafik jaringan, tabel dan gambar, disajikan dalam bentuk tabel atau penjelasan

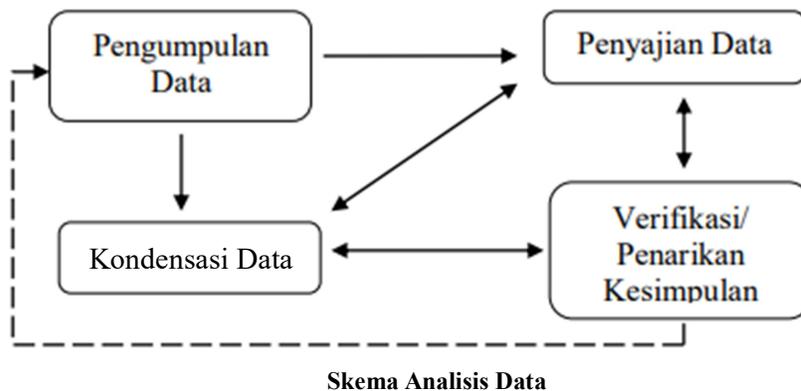
penjelasan, dimaksudkan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih..

d. Kesimpulan

Mencari makna dari pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, kemungkinan konfigurasi, dan makna pernyataan. Menarik kesimpulan dengan cermat serta validasi berupa catatan lapangan untuk menjamin keabsahan data.

Dibawah ini adalah sekma langkah demi langkah menganalisa data dari Miles dan Hurbermen

Gambar 1.1



Skema Analisis Data

(Sumber: Miles Dan Hurbermen, 2014)

6. Uji Keabsahan Data

Selain menganalisis data, untuk memperoleh data yang valid, peneliti juga perlu melakukan uji keabsahan data. Guna menguji keabsahan data atau keabsahan data, metode triangulasi digunakan oleh peneliti. Metode ini merupakan suatu metode verifikasi keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memverifikasi dan membandingkan data. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif dan juga sering digunakan dalam metode kuantitatif untuk mengukur validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Triangulasi dapat digunakan untuk menjawab

pertanyaan tentang kelompok risiko, efektivitas, perencanaan kebijakan dan anggaran, serta status epidemi dalam lingkungan yang terus berubah. (Susanto, Risnita, and Jailani 2023) .